

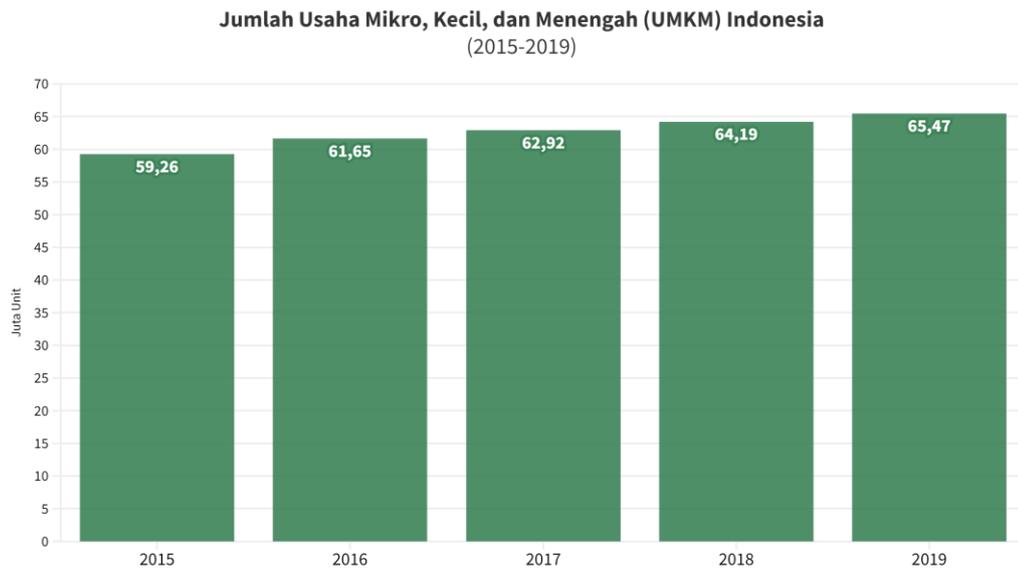
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut (Mubarak et al., 2019) dalam (Supriatna et al., 2023), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi melalui distribusi kekayaan, penciptaan lapangan kerja, kemajuan teknologi, pengurangan kemiskinan dan inovasi. Menurut (Ye & Kulathunga, 2019), dengan adanya sektor UMKM yang kuat dapat membangun sektor industri yang solid dalam perekonomian. Oleh karena itu, UMKM mempunyai manfaat yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Perkembangan ekonomi yang pesat dan profitabilitas yang lebih tinggi dari pasar negara berkembang memberi UMKM kesempatan untuk menjadi lebih kompetitif di pasar domestik dan global.

UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro (Dinkopum, 2020). Menurut peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, kriteria UMKM didefinisikan sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Terdapat 3 jenis usaha yang termasuk dalam UMKM yaitu usaha kuliner atau usaha makanan, usaha fashion atau pakaian yang banyak digemari oleh kaum anak muda dan usaha agribisnis dengan memanfaatkan perkarangan rumah menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan (Sukorejo, 2018).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber: (Mahdi, 2022)

Gambar 1.1 merupakan pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019. Jumlah UMKM pada tahun 2019 meningkat 1,98% dari 64,19 juta pada tahun 2018, menurut Kemenkop UKM. Ini mencakup 99,99% perusahaan di Indonesia. Meskipun demikian, hanya 5.637 unit, atau 0,01%, dari usaha berskala besar, dan 64,6 juta unit merupakan usaha mikro, yang merupakan 98,67% dari total UMKM di seluruh Indonesia. 798.679 usaha kecil merupakan 1,22% dari semua UMKM di dalam negeri. Namun, hanya ada 65.465 unit usaha menengah. Jumlah ini menyumbang 0,1% dari seluruh UMKM di Indonesia (Mahdi, 2022). Dengan 99% unit usaha dan kontribusi 60,5% terhadap PDB dan 96,9% terhadap penyerapan tenaga kerja nasional, UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Di tahun 2020-2021, kondisi UMKM lokal sempat menurun selama dua tahun pertama pandemi COVID-19, meskipun UMKM memainkan peran yang sangat penting (Rajasa, 2023). Survei yang dilakukan oleh UNDP dan LPEM UI terhadap 1.180 peserta UMKM menunjukkan bahwa pada saat itu lebih dari 48% UMKM menghadapi masalah bahan baku, 77% mengalami penurunan pendapatan, 88% mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Ragam Alasan UMKM Menutup Usaha Secara Temporer/Permanen



No	Nama	Nilai / %
1	Kekurangan Biaya Produksi	35,2
2	Penurunan Permintaan	30,2
3	Regulasi Pemerintah	27,5
4	Kesulitan Akses Keuangan	4,9
5	Kesulitan Bahan Baku	2,2

Tabel 1.1 Alasan UMKM Tutup Saat Pandemi Covid-19

Sumber: (Annur, 2021)

Survei yang dilakukan oleh Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) menunjukkan bahwa selama pandemi virus corona Covid-19, 24% usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia tidak beroperasi. Dari jumlah yang disurvei, 35,2% menyatakan bahwa mereka menutup usahanya karena kekurangan uang untuk membiayai produksi; 30,2% menyatakan bahwa mereka menutup usahanya karena penurunan drastis permintaan untuk produk yang mereka jual, 27,5%

menyatakan bahwa mereka menutup usahanya karena peraturan pemerintah, 4,9% menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan mendapatkan keuangan internal, dan 2,2% menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku. Selain itu, menurut survei, waktu rata-rata penutupan bisnis berkisar antara 2 minggu hingga 6 bulan, sementara 46% responden menyatakan bahwa mereka menutup bisnis mereka lebih dari enam bulan. Pada Agustus 2021, terdapat total sebesar 3.011 usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang disurvei (Annur, 2021).

Menurut Deputi Rudy dalam (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022), dari perspektif sejarah, bansos yang diberikan kepada UMKM selama masa pandemi ini membantu mereka membayar cicilan kredit mereka ke perbankan. Selain itu, pemerintah akan mendorong instrumen seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu Prakerja untuk digunakan sebagai sarana untuk mengurangi biaya bansos. Insentif Prakerja adalah yang terbesar dari semua bansos, jadi bantuan ini cukup efektif. Menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada 2020 dalam (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022), dari 64 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, sekitar 46,6 juta tidak memiliki akses ke permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. Karena kesulitan mendapatkan dana, pemerintah menawarkan dukungan untuk fasilitas pembiayaan tambahan, seperti Mekaar PNM, Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).



No	Nama	Nilai / Persen
1	Modal	45
2	Prospek Usaha ke Depan	23
3	Bahan Baku	14
4	Menjadi Pekerja	9
5	Persoalan Tenaga Kerja	5
6	Transisi Usaha Lain	2
7	Lainnya	2

Tabel 1.2 Penyebab UMKM Tutup Usaha pada Awal Kuartal II-2021

Sumber: (Annur, 2021)

Sebuah survei yang dilakukan oleh Mandiri Institute menemukan bahwa 7,1% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih belum beroperasi dari Maret hingga April 2021. Masalah permodalan adalah alasan utama para pelaku UMKM tersebut menutup usahanya. Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh 45% orang yang menjawab survei. 23% responden mengatakan bahwa prospek bisnis UMKM mereka tidak menarik. Selain itu, pandemi virus corona COVID-19 berdampak pada aktivitas perdagangan. Sebanyak 14% dari mereka yang menjawab menunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan menemukan bahan baku untuk operasi mereka. Meskipun demikian, 9% dari orang yang menjawab menunjukkan bahwa mereka telah meninggalkan pekerjaan mereka karena berubah menjadi pekerja. Namun, 84,8% pelaku UMKM sudah mulai beroperasi secara normal dari Maret hingga April 2021, sementara 8,1% masih beroperasi secara terbatas (Annur, 2021).

Menurut Amir dalam (Pratama, 2021), menjelaskan bahwa Rasio wirausaha di Indonesia hanya 3,1% dari jumlah penduduk, sangat rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia 5%, Singapura 7%, China 10%, Jepang 11%, dan AS 12%, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Amir dalam (Pratama, 2021), kondisi itu tidak lepas dari kesulitan yang dihadapi oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan kredit usaha. Menurut riset Ease of Doing Business 2020, Indonesia sejajar dengan Thailand dalam hal kemudahan mendapatkan kredit bagi UMKM. Lain halnya, Malaysia berada di peringkat ke-37, di belakang Vietnam dan India, yang masing-masing berada di peringkat ke-25. Situasi tersebut tidak boleh dibiarkan berlanjut, karena UMKM sangat membantu perekonomian Indonesia. Selama pandemi, 90% UMKM mengalami penurunan penjualan, dan 75,2% usaha mikro menghadapi kesulitan mendapatkan modal untuk kembali beroperasi (Merliyana et al., 2022).

Menurut (Tambunan, 2008) dan (Bank Indonesia, 2023), di Indonesia meskipun terdapat berbagai skema kredit UMKM yang disponsori pemerintah, mayoritas UMKM yang berada di pedesaan/daerah tertinggal, tidak pernah menerima kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Mereka bergantung pada tabungan mereka sendiri, uang dari kerabat dan kredit dari pemberi pinjaman informal untuk membiayai operasi bisnis mereka sehari-hari. Dalam pemasaran, UMKM pada umumnya tidak memiliki sumber daya untuk mengeksplorasi pasarnya sendiri. Sebaliknya, mereka sangat bergantung pada mitra dagang mereka untuk memasarkan produk mereka, baik dalam kerangka jaringan produksi lokal maupun hubungan subkontrak atau pesanan dari pelanggan.

Selain modal dari tabungan, pelaku UMKM ini biasanya menggunakan jasa para pelepas uang, atau rentenir. Pengusaha mikro dan UMKM sering menggunakan layanan pelepas uang (rentenir) karena beberapa alasan. Di antaranya adalah prosedur peminjaman yang mudah dan sederhana, seringkali tanpa agunan, dan jumlah pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan bisnis (Amalia & Rahmawati, 2019). Hal di atas menjelaskan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia masih tergolong rendah, terutama pada pelaku UMKM di Indonesia. Menurut Survei Bank Indonesia dalam (Masithah et al., 2023), menyatakan bahwa 36% pelaku UMKM menyadari pentingnya literasi keuangan, dan 60% hingga 70% dari mereka belum memiliki pengelolaan keuangan di lembaga keuangan perbankan.

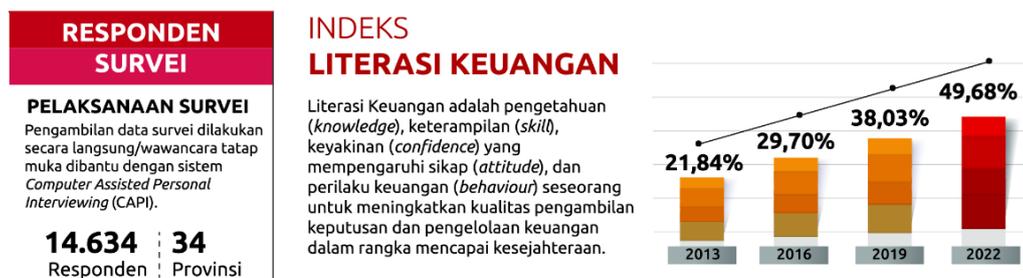
Literasi keuangan adalah kemampuan untuk mengelola uang dengan cara yang menguntungkan sepanjang hidup (Hung et al., 2009). Literasi keuangan memainkan peran penting dalam hubungan antara pengusaha, pasar keuangan dan perantara, dan pemberi pinjaman potensial pada umumnya (Burchi et al., 2021). Menjadi lebih sadar terhadap literasi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan diri pekerja, meningkatkan kemampuan mereka, dan membantu mereka mempertahankan pekerjaan mereka dengan menghindari masalah keuangan (Lopus et al., 2019). Menurut Stolper & Walter, 2017 dalam (Yuesti et al., 2020), literasi keuangan tidak dimaksudkan untuk menghalangi orang untuk menikmati hidup dan menggunakan uang mereka. Sebaliknya, dengan literasi keuangan, individu atau keluarga dapat menggunakan uang mereka dengan bijak untuk mencapai tujuan keuangan pribadinya.

Tingkat literasi keuangan yang rendah dapat mencegah usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk menilai dan memahami ketentuan pembiayaan yang berbeda secara akurat serta menavigasi proses pinjaman yang rumit (Lestari et al., 2022). Literasi keuangan yang rendah juga mengakibatkan UMKM memiliki akses yang minim terhadap sumber pendanaan eksternal, terutama di negara berkembang (Okello et al., 2017).

(Iswari, 2021) menyatakan bahwa faktor-faktor berikut menyebabkan pelaku bisnis membuat keputusan keuangan yang tidak tepat, tidak memadai, dan tidak efektif antara lain kurangnya pengetahuan tentang keuangan pribadi, kurangnya waktu untuk mempelajari manajemen keuangan pribadi, kompleksitas transaksi keuangan, dan banyaknya pilihan produk dan jasa keuangan. Menurut (Geriadi et al., 2021), keterampilan manajemen bisnis dapat membuat masalah keuangan lebih sulit bagi UMKM. Literasi keuangan yang rendah dapat mencegah UMKM untuk menilai dan memahami berbagai penyediaan pembiayaan secara akurat serta menemukan jalan keluar dari proses pinjaman yang rumit.

Maka dari itu pentingnya literasi keuangan bagi para UMKM karena dengan memiliki literasi keuangan yang baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko keuangan karena sikap risiko keuangan memungkinkan pengusaha untuk mengidentifikasi peluang dan risiko yang terkait dengan keputusan keuangan dan bisnis mereka (Dharmawan Buchdadi et al., 2020). Literasi keuangan dapat meningkatkan kinerja UMKM dalam lingkungan bisnis yang rumit dengan memperkuat basis pengetahuan organisasi. Selain itu, literasi keuangan

berkontribusi pada proses pengambilan keputusan organisasi dan membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan literasi keuangan memang sangat penting dan penting bagi kinerja UMKM (Kulathunga et al., 2020). Literasi keuangan merupakan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), keyakinan (*confidence*) yang mempengaruhi sikap (*attitude*), dan perilaku keuangan (*behavior*) seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (OJK, 2022).



Gambar 1.2 Indeks Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia

Sumber: (OJK, 2022)

Berdasarkan hasil SNLIK (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan) 2022, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%, meningkat dari 38,03% pada tahun 2019 (OJK, 2022). Berdasarkan data (OJK, 2022), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% menunjukkan bahwa, meskipun peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat literasi keuangan masih tergolong rendah. Dari setiap 100 orang, hanya sekitar 49 orang yang memahami lembaga keuangan dan produk keuangan dengan baik, sehingga ada 51 orang lagi yang belum memahami keuangan. Menurut Mahendra dalam (Annur, 2022), hasil SNLIK dapat membantu OJK dan seluruh pemangku kepentingan

membuat kebijakan, strategi, dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen serta meningkatkan keamanan masyarakat.

Menurut riset Bank Indonesia dalam (Arianti & Azzahra, 2020), mengungkapkan bahwa sektor UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal mendapatkan modal atau dana dari institusi perbankan dan non perbankan. Ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah bisnis UMKM dan dampak pada pendapatan mereka. Tingkat literasi keuangan orang menjadi lebih rendah saat pendapatan mereka rendah. Menurut (Deha, 2021), sebuah survei yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sangat terpukul selama pandemi COVID-19. Ini diungkapkan oleh ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Dalam webinar Evaluasi Ekonomi Indonesia 2021, Eisha menyatakan bahwa UMKM masih sulit mendapatkan permodalan dari bank. 75% perusahaan kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia menghadapi tantangan di sektor keuangan, terutama dalam hal akses modal saat memulai dan menjalankan bisnis mereka, serta dalam hal cicilan pembayaran. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menunjukkan bahwa sebanyak 23 juta pelaku UMKM di Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendanaan dari perbankan, sedangkan 41 juta pelaku UMKM yang telah mendapatkan pendanaan dari bank baru. Sebagai hasil dari survei yang dilakukan oleh ADB, setengah atau 50% dari UMKM Indonesia bangkrut selama pandemi. Di sisi lain, 88% usaha mikro tidak memiliki kas atau tabungan, dan sekitar 60% dari UMKM mengalami penurunan tenaga kerja.

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam (Rachman, 2022), menilai penyaluran kredit perbankan kepada UMKM masih sangat rendah. Sedangkan kredit yang digelontorkan ke sektor korporasi malah mendominasi dari total pinjaman. Padahal, sejak masa krisis 1998 hingga krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini, UMKM masih menjadi juru selamat bagi perekonomian Indonesia. Bahlil menyadari bahwa permasalahan penyaluran kredit ini terhadap UMKM memang masih terkendala persoalan administrasi, salah satunya izin usaha. Menurut (Ye & Kulathunga, 2019), sulit bagi UMKM untuk mengakses sumber keuangan, seperti bank, pasar modal atau pemasok kredit lainnya daripada organisasi yang lebih besar. Meskipun semua organisasi membutuhkan sumber daya keuangan untuk memulai, bertahan, dan tumbuh, sulit bagi UMKM untuk mendapatkan akses ke sumber daya keuangan eksternal dan pada kenyataannya aksesibilitas sumber daya tersebut telah menurun tajam. Oleh karena itu akses keuangan yang terbatas menjadi salah satu hambatan utama bagi UMKM untuk keberlanjutan bisnis mereka. Menurut (Ye & Kulathunga, 2019), persiapan laporan keuangan yang buruk dan kurangnya informasi keuangan membuat aplikasi pinjaman lebih mungkin ditolak dan karenanya berimplikasi pada akses ke keuangan.

Selain kesulitan mendapatkan akses keuangan, literasi keuangan yang rendah juga berhubungan dengan tingkat persepsi resiko keuangan UMKM. Menurut Esiebugie, Richard, & Emmanuel (2018) dalam (Buchdadi et al., 2020), sikap keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Namun, sebagian besar pengelola dan pemilik UMKM memiliki sikap yang buruk terhadap aktivitas

keuangan mereka. Ini ditunjukkan oleh orientasi masa depan yang buruk, ketidakmampuan mereka untuk mengambil risiko, dan kurangnya keterlibatan mereka dalam program pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan keuangan mereka, meskipun mereka menyadari betapa pentingnya mengarahkan kegiatan jangka pendek mereka menuju tujuan jangka panjang perusahaan. Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh persepsi risiko, terutama dalam pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak pasti (Anggraini & Mulyani, 2022).

Menurut Wise dalam (Burchi et al., 2021), peningkatan literasi keuangan membuat pengusaha memiliki probabilitas pembayaran pinjaman yang lebih tinggi dan probabilitas yang lebih rendah untuk menutup usaha mereka tanpa disengaja. Literasi keuangan yang rendah membuat orang seringkali mengambil keputusan yang salah. Menurut (Amalia & Rahmawati, 2019), sebenarnya bantuan pemerintah tidak digunakan untuk tujuan produktif dan berkelanjutan, tetapi lebih pada tuntutan konsumtif dan sederhana. Kalaupun ada, itu hanya sedikit meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi pelaku usaha mikro. Akibatnya, karena perputaran uang usaha terbatas pada hal-hal konsumtif, para pelaku UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah mencapai kesejahteraan akan kembali terjebak dalam kemiskinan.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

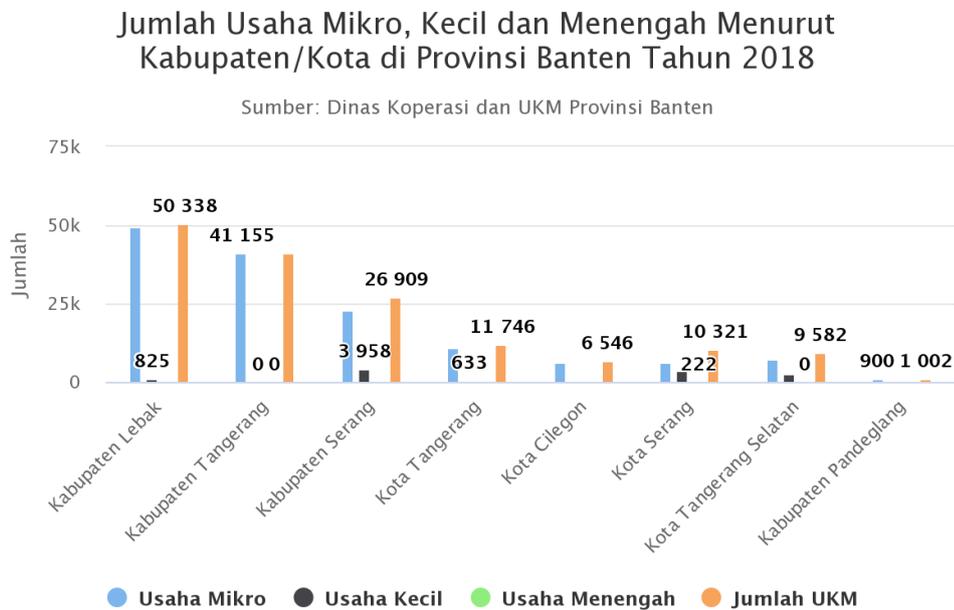
No	Nama	Nilai / Unit
1	Jawa Barat	1.494.723
2	Jawa Tengah	1.457.126
3	Jawa Timur	1.153.576
4	DKI Jakarta	658.365
5	Sumatera Utara	595.779
6	Banten	339.001
7	Sumatera Selatan	330.693
8	Sumatera Barat	296.052
9	Nusa Tenggara Barat	287.882
10	Lampung	285.909

Tabel 1.3 Jumlah UMKM Versi Kemenkop UKM Tahun 2022

Sumber: (Saktiono, 2023)

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan memajukan UMKM sebagai sektor penggerak perekonomian berkat kekayaan sumber daya alam dan populasi yang luas. Bahkan, keberadaannya dapat membantu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan yang selama ini menjadi masalah umum di negara ini (JurnalPost, 2023). Di banyak tempat, UMKM berkembang pesat. Menurut laporan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), total usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sudah mencapai 8,71 juta unit usaha pada tahun 2022. Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dominan di Pulau Jawa. Dengan 1,49 juta unit usaha, Jawa Barat adalah juara UMKM. Dengan 1,45 juta unit, Jawa Tengah berada di urutan kedua, dan Jawa Timur berada di urutan ketiga dengan 1,15 juta unit. Di luar tiga besar itu, perbedaan cukup besar. DKI Jakarta menorehkan hampir 660 ribu unit. Kelima, Sumatera Utara memiliki 596 ribu unit. Meskipun demikian, jumlah usaha paling sedikit ditemukan di tiga wilayah, yaitu Papua Barat dengan

4,6 ribu unit, Maluku Utara dengan 4,1 ribu unit, dan Papua dengan 3,9 ribu unit (Saktiono, 2023).



Gambar 1.3 Jumlah UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

Sumber: (Dinas Koperasi dan UKM, 2018)

Gambar 1.3 menyajikan jumlah UMKM dari semua kabupaten/kota di Banten, Kabupaten Lebak memiliki jumlah usaha mikro kecil terbesar dengan 50.338 perusahaan, diikuti oleh Kabupaten Tangerang dengan 41.155 perusahaan, dan Kabupaten Pandeglang dengan 1.002 perusahaan (Dinas Koperasi dan UKM, 2018). Menurut BEI terdapat 9 Sektor usaha dan banyak subsektor di dalamnya yang ada di Indonesia, Kesembilan sektor itu adalah sektor pertanian (*agriculture*), pertambangan (*mining*), industri dasar dan kimia (*basic industry and chemical*), aneka industri (*miscellaneous industry*), industri barang konsumsi (*customer good industry*), properti, real estatet dan konstruksi bangunan (*property, real estate and*

building construction), infrastruktur, utilitas dan transportasi (*infrastructure, utility, and transportation*), keuangan (*finance*), serta perdagangan, jasa, dan investasi (*trade, services, and investment*) (Saham OK, 2022).

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Jika dilihat dari data yang tertera dalam latar belakang, maka dapat terlihat bahwa pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 jumlah UMKM yang sudah menjalankan usahanya mencapai 65,47 juta. Angka tersebut membuat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, dikarenakan dengan adanya UMKM dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi melalui distribusi kekayaan, penciptaan lapangan kerja, kemajuan teknologi, pengurangan kemiskinan, dan inovasi. Tapi tidak semua UMKM dapat mempertahankan usahanya untuk jangka panjang sehingga usahanya tidak dapat berkelanjutan. Oleh karena itu perlu dianalisa lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dalam UMKM.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dalam UMKM atau yang dapat disebut sebagai *sustainability in SMEs*. *Financial literacy* yang merupakan salah satu faktor, dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan kognitif yang diperlukan untuk mengelola keuangan dan membuat keputusan yang efektif mengenai masalah keuangan (Ye & Kulathunga, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rumini & Martadiani, 2020), terbukti bahwa variabel *financial literacy* berpengaruh positif terhadap *sustainability in SMEs*. Untuk variabel *access to finance* menurut (Adomako et al., 2016) merupakan implementasi yang efektif dari rencana manajemen kewirausahaan dan keuangan

dengan memungkinkan perusahaan mengakses dana yang mungkin memiliki persyaratan agunan yang lebih tinggi tetapi juga peluang yang lebih baik. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sugita & Ekayani, 2022), terbukti bahwa variabel *access to finance* berpengaruh positif terhadap *sustainability in SMEs*. Kemudian variabel terakhir yaitu *financial risk attitude* merupakan sejauh mana perusahaan bersedia mengejar peluang sumber daya keuangan yang berisiko dalam usaha dengan hasil yang tidak diketahui (Ye & Kulathunga, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Díez-Esteban et al., 2017), terbukti bahwa variabel *financial risk attitude* berpengaruh positif terhadap *sustainability in SMEs*.

Untuk membuat UMKM lebih jangka panjang, seluruh faktor ini perlu diperhatikan agar dapat *sustainability* dalam menjalankan sebuah usaha. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis menjadikan UMKM di Kota Tangerang sebagai objek penelitian. Dari penjabaran rumusan masalah diatas, berikut uraian pertanyaan penelitian yang dimungkinkan dalam penelitian ini:

1. Apakah *financial literacy* memiliki pengaruh positif terhadap *sustainability in SMEs* di Kota Tangerang?
2. Apakah *access to finance* memiliki pengaruh positif terhadap *sustainability in SMEs* di Kota Tangerang?
3. Apakah *financial literacy* memiliki pengaruh positif terhadap *access to finance*?
4. Apakah *financial risk attitude* memiliki pengaruh positif terhadap *sustainability in SMEs* di Kota Tangerang?

5. Apakah *financial literacy* memiliki pengaruh positif terhadap *financial risk attitude*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh positif *financial literacy* terhadap *sustainability in SMEs* di Kota Tangerang.
2. Menganalisis pengaruh positif *access to finance* terhadap *sustainability in SMEs* di Kota Tangerang.
3. Menganalisis pengaruh positif *financial literacy* terhadap *access to finance*.
4. Menganalisis pengaruh positif *financial risk attitude* terhadap *sustainability in SMEs* di Kota Tangerang.
5. Menganalisis pengaruh positif *financial literacy* terhadap *financial risk attitude*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu pembaca dari berbagai aspek akademis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian lain tentang masalah yang sama di masa depan.

Selain itu, penelitian ini dapat memberi pembaca lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh *financial literacy*, *access to finance*,

financial risk attitude, dan *sustainability in SMEs* khususnya di Kota Tangerang.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan, gambaran, dan informasi tentang pengaruh *financial literacy*, *access to finance*, *financial risk attitude* terhadap *sustainability in SMEs* pada mahasiswa. Nantinya data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian harus memiliki batasan untuk membuat hasilnya lebih jelas. Batasan ini ditetapkan berdasarkan ruang lingkup dan kriteria yang relevan dengan penelitian. Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang diteliti adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Tangerang
2. Pemilik UMKM yang pernah mengajukan pengajuan pinjaman modal ke bank/fintech/koperasi/leasing/institusi keuangan.
3. Pengambilan data secara offline dan online dengan mengisi kuesioner melalui *Google Form* dalam kurun waktu Bulan April sampai dengan Mei 2023.
4. Penelitian menggunakan IBM SPSS Statistics 25 untuk *pre-test* dan SmartPLS 4 untuk *main-test*.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti memiliki struktur sistem penulisan agar laporan penelitian dapat lebih mudah dipahami, sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan membahas mengenai masalah, tujuan, manfaat, dan batasan penelitian, serta sistematika penulisan, dan menjelaskan latar belakang fenomena mengenai UMKM, dengan penekanan khusus pada literasi keuangan pelaku UMKM yang masih rendah.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berdasarkan teori yang telah dibahas oleh para ahli dalam buku dan jurnal, bab ini menjelaskan setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga mencakup model penelitian, hipotesis penelitian, dan penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang objek penelitian dan metode yang digunakan. Ini mencakup desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, prosedur pengumpulan data, dan operasional variabel. Selanjutnya, menjelaskan teknik analisis data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian sebelumnya. Ini mencakup analisis statistik dari jawaban responden, profil responden sebagai acuan, hasil uji hipotesis, dan pembahasan tentang temuan penelitian yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil pengolahan data selama penelitian yang dilakukan penulis serta saran yang diberikan kepada UMKM maupun saran untuk penelitian selanjutnya dan bagi pembaca.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA